

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 merupakan tahun dimulainya pandemi Covid-19 di Indonesia yang membawa banyak tantangan sehingga pemerintah harus menerapkan pembatasan kegiatan sosial. Krisis yang datang secara berturut-turut akibat pandemi Covid-19 dan permasalahan ketidakstabilan perekonomian di Indonesia yang telah merugikan dan menyulitkan banyak pihak Mahyuni & Setiawan (2021). “Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Penurunan kinerja ekonomi tidak hanya memengaruhi perusahaan besar, baik yang berskala multinasional maupun nasional, tetapi juga berdampak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan atau terpaksa berhenti bekerja, menyebabkan peningkatan angka pengangguran.” (Wijoyo & Widiyanti 2020).

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (UMKM) usaha mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh individu atau badan usaha individu yang memenuhi standar usaha mikro sesuai ketentuan undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha individu yang bukan anak cabang atau tidak dimiliki oleh badan usaha menengah atau berkembang. Usaha menengah, di sisi lain, adalah kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau pelaku ekonomi; ini bukan anak perusahaan atau cabang dari badan usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar secara langsung atau tidak

langsung oleh perusahaan Alam (2023). Usaha menengah juga memiliki total aset bersih atau pendapatan tahunan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Nikmah 2023).

Tabel 1. 1
Data Pendapatan UMKM

Nama Distrik	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Pendapatan Rata – Rata Pelaku UMKM	Pendapatan Per Distrik Tahun	Pendapatan Rata – Rata Pelaku UMKM	Pendapatan Per Distrik Tahun
Jayapura Utara	3.000.000	792.000.000	3.145.000	1.132.200.000
Jayapura Selatan	3.150.000	831.000.000	3.210.000	1.001.520.000
Abepura	3.215.000	1.041.660.000	3.335.000	1.120.560.000
Heram	2.850.000	786.000.000	3.080.000	887.040.000
Muara Tami	2.500.000	960.000.000	3.100.000	1.116.000.000
Jumlah	14.715.000	4.411.860.000	15.870.000	5.257.320.000

Sumber : Disperindagkop UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Jayapura (2024)

Menurut data yang dipublikasikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Jayapura, bahwa terdapat peningkatan dari tahun 2022 hingga 2023. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa tahun 2023. Jayapura Utara mencapai sebesar 21,55% sedangkan Jayapura Selatan mencapai sebesar 19,05% kemudian Abepura mencapai sebesar 21,31% sementara Heram mencapai sebesar 16,87% selanjutnya Muara Tami mencapai sebesar 21,33%. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang terjadi pada pendapatan UMKM meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dibahas peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, menyebarluaskan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan Kusumaningtyas & Budiantara (2023). Secara keseluruhan, tujuan pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata, yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti melalui penciptaan lapangan kerja untuk mencapai distribusi pendapatan yang adil dan mengurangi tingkat pengangguran (Amrullah & Zumrotussaadah, 2021).

Salah satu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang sering dipilih oleh para pelaku UMKM adalah sektor kuliner. Menurut Ramadhan (2021) kuliner adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, dan penjualan makanan dan minuman. UMKM kuliner mencakup berbagai jenis usaha yang memproduksi, menjual, dan menyajikan makanan dan minuman, mulai dari warung makan, restoran, kafe, hingga penjual makanan kaki lima.. Dengan mendirikan usaha di bidang pangan, para pelaku usaha dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM. Saat ini, bisnis makanan dan minuman merupakan jenis usaha yang berkembang dengan sangat pesat.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UMKM) (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan tertinggi yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terjadi di Pulau Papua, dengan angka 6,94%. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05% secara kumulatif sepanjang tahun 2023. Angka ini lebih rendah 0,26 poin persentase dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 5,31%. Pertumbuhan tahunan pada kuartal IV 2023 tercatat sebesar 5,04% (*year-on-year/yoy*), naik tipis 0,08 poin persentase

dari 4,96% pada kuartal IV 2022. Ekonomi pada kuartal IV 2023 juga tumbuh 0,45% secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtt) dari kuartal III 2023, meskipun angka ini turun 1,15 poin persentase dari pertumbuhan kuartal III terhadap kuartal II yang sebesar 1,60%.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2023, diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB), mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75 juta atau US\$4.919,7. Nilai PDB ADHB pada 2023 melampaui nilai 2022 yang sebesar Rp19.588,1 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan (ADHK) pada 2023 tercatat sebesar Rp12.301,4 triliun, meningkat dari Rp11.710,2 triliun pada tahun 2022 (databoks.katadata.co.id, 2024). Menurut Matias Mano (2024), kontribusi UMKM di Kota Jayapura khususnya pada sektor kuliner mencapai 121% pada tahun 2023, melebihi target 100% berdasarkan catatan dari Badan Pendapatan Kota Jayapura (Jubi.id, 2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menyebutkan bahwa pada tahun 2022 kementerian koperasi dan UMKM bersama Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pendekatan komprehensif terhadap Koperasi dan UMKM yang menghasilkan sebanyak 9 juta data UMKM. Selanjutnya, pada tahun 2023 pendataan akan dilakukan di 215 Kabupaten/kota di 32 Provinsi, mencakup usaha non pertanian baik yang berstatus menetap maupun tidak menetap. Menurut Disperindagkop dan UKM Kota Jayapura (2023) terdapat 659 total UMKM yang terdapat di Kota Jayapura yang terbagi di 5 Distrik yaitu Distrik Jayapura Utara sebanyak 142 UMKM, Distrik Jayapura Selatan sebanyak 133 UMKM, Distrik Abepura sebanyak 131 UMKM, Distrik Heram sebanyak 124 UMKM dan Distrik Muara Tami sebanyak 129 UMKM.

Melihat hal ini, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*) pada 17 Agustus 2019 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. QRIS merupakan terobosan antara Bank Indonesia (BI) dan

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk memfasilitasi pembayaran melalui kode QR di Indonesia Santika et al. (2022). Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bergabung dengan sistem pembayaran non-tunai berbasis kode QR adalah salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan QRIS, usaha kecil, menengah, dan mikro tidak perlu memiliki banyak kode QR dalam bisnisnya, karena kode QR yang terstandar dapat digunakan untuk membayar berbagai penyedia layanan sistem pembayaran, mengurangi kebutuhan masyarakat untuk membawa banyak uang tunai dalam jumlah besar, kartu *e-money* dan tidak perlu memiliki kartu kredit yang berbeda untuk dapat melakukan transaksi (Alam 2023).

QRIS juga menggunakan kode QR standar internasional EMV Co yang telah diterapkan di berbagai negara di kawasan asia. Oleh karena itu, UMKM yang menggunakan QRIS di tokonya dapat menerima pembayaran langsung dari aplikasi pembayaran asal negara konsumen. Selain mempermudah proses pembayaran, QRIS juga mengurangi biaya transaksi untuk semua penyelenggara jasa sistem pembayaran (Erwinsyah, et al.2023).

QRIS juga memiliki banyak manfaat transaksi yang dilakukan melalui aplikasi pembayaran QRIS menjadi lebih mudah, cepat, praktis, dan efektif. Masyarakat memilih QR Code dengan QRIS karena standarnya. Bisnis penjualan mungkin mengalami peningkatan karena mereka dapat menerima pembayaran berbasis QR apa pun. Meningkatkan branding, modern, dan lebih efisien dengan menggunakan QRIS, mengurangi biaya administrasi, dan tidak perlu memberikan uang kembalian transaksi yang tercatat secara otomatis dan dapat dilihat kapan saja. Terpisahnya dana antara perusahaan dan individu membantu rekonsiliasi dan mungkin mencegah pembukuan transaksi tunai serta meningkatkan kredit. (Erwinsyah, et al.2023).

Akibat tingginya jumlah uang beredar, banyaknya kasus pemalsuan uang, dan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk mencetak, menyimpan mendistribusikan dan memusnahkan uang menjadi latar belakang Bank Indonesia mencanangkan gerakan penggunaan instrumen non-tunai dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonomi yang diberi nama dengan gerakan nasional non-tunai Rangkuti (2021). Di Indonesia, terdapat beberapa aplikasi yang populer digunakan oleh masyarakat, antara lain OVO, GoPay, Dana, Link Aja serta QRIS yang disediakan oleh institusi perbankan. QRIS berfungsi sebagai standar untuk semua transaksi non-tunai menggunakan kode QR. Dengan menggunakan QRIS, diharapkan dapat meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat (Santika et al. 2022).

Pertumbuhan nilai pembayaran non-tunai di Indonesia tertuang dalam *Cable News Network* (CNN) Bank Indonesia telah mencatat digital banking yaitu pada bulan april tahun 2024 mencapai Rp15.881,53 triliun *yoy (year-on-year)*. Namun saat ini jika dilihat pertumbuhan uang elektronik yang ada di Indonesia mengalami meningkat sebesar 41,70% menjadi Rp 253,39 triliun. Sementara itu, transaksi BI-Fast melesat 55,4% menjadi Rp 1.760,59 triliun. Disisi lain pertumbuhan Qris sangat meningkat sebesar 175,44% dengan jumlah pengguna mencapai 48,12 juta dan jumlah merchant mencapai 31,61 juta yang sebagian besar adalah merchant UMKM. Kemudian penggunaan kartu kredit meningkat mencapai 7,71%, mencapai Rp 105,13 triliun sedangkan transaksi pembayaran menggunakan kartu atm, mengalami penurunan sebesar 3,80% menjadi Rp 1.073,57 triliun cnnindonesia.com.

Saat ini Indonesia, penggunaan pembayaran berbasis lanjutan terus berkembang secara konsisten. Bank Indonesia (BI) melaporkan pada Juli 2023 transaksi uang elektronik bernilai Rp160,47 triliun. Jumlah ini meningkat 4,79% dibandingkan bulan sebelumnya yang berjumlah

Rp153,14 triliun. Selain itu, terjadi peningkatan nilai transaksi uang elektronik sebanyak 65,88% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Transaksi uang elektronik senilai Rp 96,74 triliun di Juli 2022. Secara keseluruhan, manfaat penukaran belanja menggunakan uang elektronik tercatat sebanyak Rp 39,23 triliun. Nilai transaksi transfer uang elektronik ketika itu sebanyak Rp 32,66 triliun. lalu, nilai tukar uang elektronik first garnish up sebanyak Rp 719 miliar. Sementara nilai penukaran isi ulang uang elektronik sebesar Rp 83,94 triliun.

Tarik tunai pula memiliki nilai transaksi uang elektronik sebesar Rp 1,05 triliun. Sedangkan transaksi penukaran uang elektronik bernilai Rp 873 miliar. Namun, jumlah transaksi memakai uang elektronik mengalami penurunan sebesar 25,11% sebagai 1,76 miliar di Juli 2023. Sebulan lalu, volume penukaran uang elektronik mencapai dua,35 kali lipat. BI juga merinci, nilai bursa mastercard pada Indonesia di juli 2023 sebanyak Rp 36,13 triliun. Jumlah tadi semakin tinggi 7,31% dibandingkan bulan sebelumnya yang berjumlah Rp33,67 triliun. Sementara nilai penukaran kartu cek pada Juli 2023 sebesar Rp 671,77 triliun. Nilainya yang di bulan sebelumnya sebanyak Rp 660,23 triliun, semakin tinggi 1,75%. (Pangesti, et al., 2024).

Menurut laporan dari Bank Indonesia (BI), penggunaan sistem pembayaran berbasis uang muka/tunai elektronik menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan minat yang tinggi dari masyarakat dalam mengadopsi pembayaran digital menggunakan uang elektronik. Keberadaan sistem pembayaran digital ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan transaksi dengan pelanggan mereka. Saat ini, pembayaran tanpa tunai semakin diminati, Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan sistem pembayaran di Indonesia berbasis server yang dapat diakses oleh siapa saja melalui QR Code, yang dikenal dengan sebutan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Sebagai respons terhadap era digital saat ini serta

untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, pemerintah telah memperkenalkan QRIS sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap perekonomian Indonesia (Pangesti, et al., 2024).

Persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*) adalah tingkat di mana seseorang percaya bahwa menerapkan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerja. dan mendefinisikan persepsi sebagai sejauh mana seseorang itu percaya bahwa penggunaan sistem teknologi tertentu akan lepas dari usaha. mendefinisikan persepsi kemudahan penggunaan, dimana seseorang percaya bahwa teknologi yang digunakan mudah dipahami (Chairunnisa 2023) .

Persepsi kemanfaatan (*perceived use fulness*) berkaitan dengan seberapa besar seseorang percaya menggunakan teknologi tertentu akan meningkatkan kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Manfaat yang dirasakan adalah orang yang menggunakan program khusus untuk melakukan tugasnya lebih cepat. Dapat menghasilkan hasil yang lebih cepat dan menyenangkan dibandingkan tanpa menggunakan teknologi, baik fisik maupun nonfisik. Ketika seseorang percaya bahwa teknologi membantu kinerja mereka, mereka antusias menggunakannya (Rahmawati & Murtanto 2023).

Setelah melakukan survei pendahuluan pada beberapa UMKM di Kota Jayapura pada tanggal 03 Juni 2024. Para UMKM lebih memilih menggunakan *QRIS* karena lebih gampang digunakan dan mudah dimengerti. Seperti diungkapkan oleh Ibu Rosdiana bahwa menggunakan *QRIS* tidak perlu mencari uang kembalian, menghemat waktu dan bisa melakukan transaksi dimana pun dan kapan pun. Berbeda dengan Pak Riski, ia menggunakan *QRIS* karena ingin mengikuti perkembangan zaman yaitu menggunakan *QRIS* sebagai pembayaran non-tunai. Nur

Aisfah juga mengungkapkan bahwa menggunakan *QRIS* ada beberapa risiko yaitu keamanan data dan kendala jaringan dalam melakukan transaksi.

Menurut penelitian Rahniarti (2022) persepsi manfaat dan kemudahan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan *QRIS* di UMKM. Penelitian Purbananda et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh secara positif terhadap persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kemanfaatan. Ketiga penelitian Simatupang & Ramadhani (2023) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan mempengaruhi positif terhadap penggunaan *QRIS* sedangkan persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan *QRIS*.

Setelah itu penelitian Rahmawati & Arfiansyah (2023) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan *Qris*. Selanjutnya berdasarkan penelitian Ulya et al. (2023) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan *QRIS*. Berdasarkan penelitian Kamilah & Haryati (2024) persepsi manfaat dan kemudahan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan *QRIS*. Sementara penelitian Jati et al. (2023) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap *QRIS*.

Sisi lain Setiawan & Mahyuni (2020) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap *QRIS*. Namun penelitian Mahyuni & Setiawan (2021) menemukan bahwa menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap *QRIS*. Sedangkan penelitian Kusumaningtyas & Budiantara (2023) menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan *QRIS* semuanya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan UMKM. Berbeda dengan penelitian Amrullah &

Zumrotussaadah (2023) menunjukkan bahwa UMKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu menangani kemiskinan dan pengangguran selama pandemi.

Pada penelitian Alam (2023) menemukan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Terdapat penelitian Nikmah (2023) menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan berpengaruh positif terhadap UMKM menggunakan QRIS. Bahwa penelitian Erwinsyah et al. (2023) menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap QRIS. Dilakukan penelitian Namira (2022) persepsi manfaat dan kemudahan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan QRIS.

Sebuah penelitian Santika et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap QRIS. Dilakukan penelitian Rangkuti (2021) persepsi kemanfaatan dan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap QRIS. Berdasarkan penelitian Chairunnisa (2023) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan QRIS. Berdasarkan penelitian Pangesti, et al., (2024) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap pedagang kaki lima. Terakhir penelitian Rahmawati & Murtanto (2023) persepsi manfaat dan kemudahan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan QRIS.

Hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, semua penelitian tersebut masuk kedalam cabang akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan (behavioral accounting) Akuntansi keperilakuan adalah jenis akuntansi yang menyelidiki interaksi antara perilaku manusia dan sistem akuntansi. Istilah sistem akuntansi digunakan di sini dalam arti luas, mengacu pada keseluruhan desain alat pengendalian manajemen seperti sistem kontrol, sistem penganggaran,

desain akuntansi akuntabilitas, desain organisasi seperti desentralisasi atau sentralisasi, desain pengumpulan biaya, desain penilaian kinerja, dan pelaporan keuangan (Ataina Hidayati 2002).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memiliki tujuan untuk meneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Di Kota Jayapura Menggunakan QRIS Sebagai Metode Pembayaran. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN UMKM MENGGUNAKAN QRIS SEBAGAI METODE PEMBAYARAN DI KOTA JAYAPURA". Penelitian ini diadopsi dari jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Rahniarti (2022) yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Di Kota Palu Menggunakan QRIS Sebagai Metode Pembayaran. Namun, perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada pelaku usaha UMKM di Kota Palu, sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada pelaku usaha UMKM di Kota Jayapura.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kemudahan berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan QRIS?
2. Apakah manfaat berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan QRIS?
3. Apakah manfaat dan kemudahan berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan QRIS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan secara parsial terhadap keputusan UMKM menggunakan QRIS.
2. Untuk menganalisis pengaruh manfaat secara parsial terhadap keputusan UMKM menggunakan QRIS.

3. Untuk menganalisis pengaruh manfaat dan kemudahan secara simultan terhadap keputusan UMKM menggunakan QRIS

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan baik penulis maupun pembaca, serta menjadi titik awal bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM untuk memanfaatkan QRIS sebagai metode pembayaran di Kota Jayapura.

Manfaat Praktis:

a. Bagi UMKM

UMKM di Kota Jayapura dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi dan keputusan mereka dalam mengadopsi QRIS, sehingga dapat mengoptimalkan potensi teknologi dalam pengembangan bisnis mereka.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat memberikan pandangan berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung adopsi QRIS oleh UMKM, membantu pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan inklusi keuangan.

c. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memperoleh wawasan praktis tentang implementasi teknologi keuangan dalam konteks UMKM. Penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian lebih lanjut atau proyek inovatif.

d. Bagi peneliti

Penelitian tentang pengaruh QRIS pada UMKM di Kota Jayapura dapat memberikan beragam manfaat bagi peneliti, mulai dari hasil data yang lebih akurat hingga wawasan yang lebih luas tentang pemanfaatan teknologi finansial dalam industri UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan proposal ini penulis akan menguraikan kedalam 3 (tiga) bab yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan beberapa hal pokok dengan mengetengahkan yang mendasari diangkatnya judul proposal skripsi ini. Hal itu terlihat pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, maka penulis kemukakan pengertian judul dan garis besar isi yang turut mendukung terselesaikannya pembahasan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan memandu pembaca untuk mengetahui pokok masalah yang akan diteliti mempunyai relevansi (sesuai atau tidak) dengan teori yang ada dan sebagai landasan teoritis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini metode penelitian yang menguraikan beberapa hal yaitu: pendekatan dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variable penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang menguraikan gambaran umum baik subjek maupun objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh modal usaha dan tenaga kerja terhadap perkembangan usaha.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian. Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.

